

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007 TENTANG
KEBOLEHAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)**



Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2019 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007 TENTANG
KEBOLEHAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(StudiPada KPU Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Sebagai
Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)



Pembimbing I: Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1440 H/2019 M

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk pencalonan kepala daerah secara independen karena undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik yang dirasa sudah melanggar hak konstitusional sebagai warga Negara.

Dari penjelasan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada KPU Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan pada KPU Kota Bandar Lampung serta untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan fiqh siyasah Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang bersifat deskriptif-analitik. Kemudian peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode berfikir induktif sehingga diperoleh kesimpulan.

Temuan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membolehkan adanya putusan tentang calon independen dalam mencalonkan sebagai Kepala Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa syarat dukungan minimal 6,5% dari jumlah DPT, dan syarat tersebut tidak boleh memberatkan calon perseorangan, pada KPU Kota Bandar lampung syarat yang harus di penuhi yaitu 6,5% dari jumlah DPT serta foto copy KTP dalam bentuk soft copy dan hard copy, hal ini membuat calon perseorangan tersebut kesulitan dalam mengumpulkan dukungan, karena masyarakat kota Bandar Lampung tidak mengaenal sistem pencalonan dengan baik. analisis yang diperoleh tentang mekanisme dan persyaratan calon perseorangan bahwa antara teori dan praktek pada KPU Kota Bandar Lampung sudah di jalankan dengan baik. Pada hakikatnya tidak boleh ada satupun peraturan yang melanggar hak dari warga negaranya. Mahkamah Konstitusi melegalkan dengan adanya calon perseorangan yang ingin menjadi calon kepala daerah apabila melewati partai politik tidak bisa. Dalam perspektif Fih Siyasah, mekanisme pencalonan perseorangan dalam pemilukada sesuai dengan konsep *masalah ammah* , *Hurriyyah Ar-Ra'y*, dan *Hurriyyah As-Syakhsiyyah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-
V/2007 TENTANG KEBOLEHAN CALON PERSEORANGAN
(INDEPENDEN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi pada KPU Kota Bandar Lampung)

Nama : Ulvi Maghvirotul Diniyah

NPM : 1421020127

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

NIP.197009011997031002

Pembimbing II

Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H

NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

NIP. 195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35313, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-V/2007 TENTANG KEBOLEHAN CALON PERSEORANGAN (INDEPENDEN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)** oleh **Ulvi Maghvirotul Diniah NPM 1421020127** Jurusan **Siyasah**, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis / 13 Desember 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal., S.Sos., M.H

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.L., M.Ag

(.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Alamsyah., S.Ag., M.Ag

(.....)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Alamsyah., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Al-Baqarah: 30)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yakni, Ayahanda Istoyo dan Ibunda Alm. Risnawati yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.
2. Adikku Luthvi Sahara Farida yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Ulvi Maghvirotul Diniah, lahir pada tanggal 14 Juni 1996 di Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari Ayahanda Istoyo dan Ibunda Risnawati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Gayau Sakti, selama tahun 2002-2008.
2. MTS Jauharotul Muallimin, selama tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, selama tahun 2011-2014
4. UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Siyasah tahun 2014

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum penulis menyusun Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan (Independen) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)”.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan (Independen) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Alamsyah, M.Ag., dan Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Kepada Bapak Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan observasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Istoyo dan Ibunda Alm. Risnawati serta Adikku Luthvi Sahara Farida yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Heru Suza'is yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Siyasah D yang telah memberikan pengalaman dan banyak kenangan selama 4 tahun, kepada Widi, Caca, Wilda, Reska, Oriza, Mae, Lia, Juju, Ayuna, Mita, Huda, Enggi, Rizki, Ali, Dede, Hendra, Budi, Kris dkk yang semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
10. Para sahabatku D'qorib yaitu Novi Supini, Yetti Dayanti, Siti Rohana, Ismi Akhita Fajarwati, semoga kalian diperlancar segala urusannya dan dipermudah nyusun skripsinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, Oktober 2018
Penulis,

Ulvi Maghvirotul Diniah
NPM. 1421020127



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah.....	18
B. Mekanisme Pemilihan Dalam Fiqh Siyasah	27
C. Dalil dan Metode Ijtihad dan Kaidah Tasyri'iyah.....	33
D. Perkembangan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	49
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007	
1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-V/2007	57
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007	60
3. Syarat Calon Perseorangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.....	64

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung	71
B. Payung Hukum KPU Kota Bandar Lampung	77
C. Sistem Rekrutmen Calon Perseorangan (Independen) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 pada KPU Kota Bandar Lampung.....	78
D. Mekanisme KPU Kota Dalam Menjaring Calon Perseorangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007	80

BAB IV ANALIS DATA

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang Kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Bandar Lampung	83
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi mengenai skripsi ini, perlu penjelasan makna atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

Tinjauan Fiqh Siyasah. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari).¹ Fiqh Siyasah adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahiddin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat manusia,² untuk mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h.6

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.³

Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁴ Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang diperbolehkannya calon perseorangan (independen) dalam pemilu.

Calon perseorangan (independen). Calon adalah orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi

³Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

⁴Jogal's Note, "Pengertian dan Macam-Macam Putusan " (On-Line), Tersedia di www.Jogablash.Wordpress.Com, 8 Februari 2018

⁵Wikipedia, " Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia " (On-Line), tersedia di <https://idm.wikipedia>. Orang, 8 Februari 2018

sesuatu.⁶ Sedangkan perseorangan adalah berkaitan dengan orang secara pribadi.⁷ Jadi calon perseorangan adalah orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih menjadi sesuatu secara pribadi.

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/ Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Studi adalah kajian, telaah, dan penyelidikan ilmiah.⁹ KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bandar Lampung adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR berasal dari tokoh masyarakat atau perguruan tinggi yang tidak berafiliasi pada parpol peserta pemilu untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu anggota tersebut.¹⁰ Yang terletak di Kota Bandar Lampung dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 238

⁷*Ibid.*, h. 987

⁸http://seputar_pengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada, 9 februari 2018

⁹Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 1545.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 719.

Ketidakseimbangannya syarat antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik tidak hanya pada saat pencalonannya, tapi juga saat kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan sehingga menjadi pemicu rendahnya jumlah calon independen yang mendaftar. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon independen menimbulkan perdebatan antara calon dari partai politik dengan calon perseorangan. Hal ini yang menarik untuk diteliti dalam penulisan skripsi tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah studi pada KPU Kota Bandar Lampung.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer fokus dari pusat ke daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis yang dimaksud adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratannya dan tata caranya didalam peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam peraperaturan perundang-undangan.¹¹ Hal ini sejalan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Putusan Mahkamah atas hasil uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Ranggalawe. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang tersebut, antara lain, pasal 56 ayat (2), yang berbunyi: *Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*; Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frase “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; Pasal 59 ayat (2)sepanjang mengenai frase “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frase “partai politik atau gabungan

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*,(Jakarta:Presentasi Pustaka), 2005, h. 8.

partai politik wajib”, frase “yang seluas-luasnya”, dan frase “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”.¹²

Pasal-pasal tersebut, menurut Ranggalawe, hanya memberikan hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan atau mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta sama sekali menutup peluang pasangan calon independen. Ranggalawe juga mengkaitkan dengan dibolehkannya calon perseorangan di daerah Nanggroe Aceh Darussalam dimana dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh disebutkan “ pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: (a) partai politik atau gabungan partai politik; (b) partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; (c) gabungan partai politik lokal dan politik lokal; dan/ atau (d) perseorangan.”¹³

UUD 1945 pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon Kepala Daerah. Hal tersebut dapat kita baca dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik.

¹²J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 189.

¹³*Ibid.*, h. 190

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekaligus memberikan kesempatan bagi calon perseorangan menjadi Kepala Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah yang membatalkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, calon independen di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴ Amanat putusan Mahkamah Konstitusi kemudian diikuti dengan perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. dalam konsideran menimbang huruf b. UU Nomor 12 Tahun 2008 diatas dinyatakan tegas: “untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan”.¹⁵

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dalam mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 huruf b

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang nabi Nabi SAW terakhir yang *ummisebagai* tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bermula dari hal tersebut dan dalil-dalil nash maka Ulama' membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syariat yaitu mendatangkan kemashlahatan serta menolak berbagai kerusakan " mashlahah mursalah". Para mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan produk-produk hukum karena mereka semua sepakat bahwa syari'at Islam telah membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu menjawab berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang selalu berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah "لَا يَنْكُرُ تَخْيِيلُ أَحْكَمُ بِ تَخْيِيلِ أَرْمَنْ"(perubahan situasi dan kondisi (adat dan tradisi) suatu zaman berpengaruh besar terhadap sejumlah besar hukum-hukum syari yang ditetapkan berdasarkan ijtihad).”¹⁶

Di dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang kepemimpinan yang sesuai dengan syari'at, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 2/30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Media Pratama), 2007, h. 16.

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Q.S Al-Anbiyaa': 21/73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : "Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,"

Dalam Islam, konsep mekanisme calon perseorangan sesuai dengan konsep masalah ammah, hurriyah al-ra'yi, dan hurriyah al-syakhsiyyah.¹⁷

Berdasarkan alasan diatas penulis mengambil judul " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)"

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

¹⁷Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2002), h. 151-157.

- a. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon independen dalam pemilihan umum Kepala Daerah?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah pada KPU Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum positif maupun hukum islam selebihnya dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan

(literatur) disamping literature-literatur yang sudah ada tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *FieldResearch*(Penelitian Lapangan). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹⁸ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga,

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 15.

dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada fenomena tertentu”.¹⁹ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan fiqh Siyasah terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di KPU Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan ketua KPU Kota Bandar Lampung, Ketua Divisi Hukum KPU Kota Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.²⁰ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti sesuatu.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.²¹ Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²²

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen. Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan. Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati

²¹Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

²²Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

secara langsung tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan, atau “ mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya”, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara didalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa

besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu “ pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”.²³ yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pegoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²⁵ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

²³*Ibid.*, h. 55

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115.

²⁵*Ibid.*, h. 115

- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistemizing atau sistematisasi, yaitu “ menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²⁶ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²⁶Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah dan muamalah yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahwa seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah, dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum, itu adalah ajaran inti sari ajaran Islam yang agung. Kepemimpinan bukan suatu prestise yang perlu dibanggakan, tapi merupakan bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terhadap prinsip-prinsip keimanan. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin harus memegang komitmen untuk menunaikan kewajiban kepemimpinannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, karena pemimpin adalah amanah yang akan

dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang dipimpin dan juga kepada rakyat yang dipimpin dan juga kepada Allah.²⁷

Karena itu, dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang layak menjadi pemimpin setidaknya memiliki: *pertama*, kemampuan elektual dan spiritual yang unggul; *kedua*, akhlak atau moralitas yang tinggi; *ketiga*, kemampuan menjadi pelayan umat secara adil; *keempat*, amanah, jujur dan siddiq.

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, dalam menabur dan menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Oleh karena itu, pemerintah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 M hingga Khulafa Ar-Rasyidin yang berakhir pada sekitar 656 M merepresentasikan sebuah upaya penegakan kebajikan dimuka bumi.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat dalam sebuah riwayat, bahwa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Toleransi ini terdokumentasi dalam Piagam Madinah yang berintikan, antara lain: penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga dengan damai, kerjasama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya.²⁸

²⁷Syarifuddin Jurdin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 59.

²⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 16

Selama Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara Madinah, ia menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Wafatnya Nabi maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) dan berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan terakhir. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.²⁹

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Mekanisme pengambilan keputusan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan dan tentang siapa yang memiliki kata akhir. Sesuai petunjuk Al-Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meskipun seorang Rasul, sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula, beliau hanya minta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang, beliau lemparkan

²⁹Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 37

masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.³⁰

Menurut bahasa khalifah berarti pengganti, maksudnya pengganti pemerintahan Nabi Muhammad SAW, bukan dalam hal kenabian dan kerasulan tetapi dalam hal kepemimpinan pemerintahan yaitu dalam memelihara, mengurus, mengembangkan jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian khalifah harus melayani masyarakat (amar makruf) dan sebaliknya juga memiliki kekuasaan dalam mengantisipasi dekadensi moral (nahi munkar). Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah, sedangkan pemegang kekuasaan imamah disebut imam, pemegang kekuasaan umarah artinya amir. Para khalifah yang jujur dan adil berlangsung selama tiga puluh tahun (khalifah ar-rasyidin), yaitu: Khalifah Abu Bakar Shidiq RA, Khalifah Umar Ibnul Al-Khattab RA, Khalifah Utsman Bin Affan RA, Khalifah Imam Ali bin Abu Tahalib RA. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam dilakukan pemilihan umum adalah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, mereka berkumpul ditempat pemungutan suara yang bernama Saqifah Banu Saidah, ditempat itu Abu Bakar As-Syidiq RA terpilih dalam kemenangan suara tipis melawan Ali bin Abu Tahalib RA. Dengan demikian suara Islam terpisah dua, yang pertama kelompok Abu Bakar yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab RA, yang khawatir kepemimpinan berpindah tangan karena Nabi Muhammad SAW telah membentuk kepemimpinan pemerintahan Negara

³⁰Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 195.

(selanjutnya kita sebut kelompok Sunni), sedangkan kelompok kedua adalah Ali bin Abi Tahlib, yang karena kecintaannya kepada tokoh yang baru saja meninggalkan mereka ini, berharap jenazah Nabi Muhammad SAW dikebumikan terlebih dahulu, jadi mereka tidak datang ke TPS (selanjutnya kita sebut kelompok syiah), karena mengikuti keluarga nabi.³¹

1. Pemerintahan Abu Bakar As-syidiq RA

Abu Bakar memulai **memangku** jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan pada **usia 61 tahun** terpilih dengan suara terbanyak menggantikan pemerintahan Nabi Muhammad SAW, tepatnya Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan 11 hari yaitu dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi atau dari tahun 11 Masehi sampai dengan 13 Hijriyah.

Pernah suatu kali Abu Bakar memerintahkan Umar untuk mengejar para penunggak pajak, Umar lalu menolaknya karena walaupun dijuluki sebagai singa padang pasir ketika peperangan Umar tidak tega mengejar sesama Islam. Umar akhirnya dipecat dan digantikan oleh Khalid bin Walid. Sebagai konvensi Negara demokrasi, kepala pemerintahan melalui masa jabatannya dengan sebuah pidato pelantikan. Hal ini rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Dengan pidato pelantikan tersebut diharapkan sebagai janji penguasa kepada

³¹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 244.

rakyat, tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pemerintah dan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

2. Pemerintahan Umar bin Khattab RA

Umar mulai memangku jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan pada usia sekitar 57 tahun diangkat menggantikan Abu Bakar karena penunjukan, tetapi kendati kemudian singa padang pasir ini yang paling demokratis, jadi tepatnya Umar memerintah selama 10 tahun yaitu dari tahun 634 sampai dengan 644 Masehi atau dari tahun 13 sampai dengan 25 Hijriah.

Umar selaku pejabat pemerintahan merasa risau dengan keadaan pemerintahannya yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, untuk mengentaskan kemiskinan Umar langsung melihat keberadaan rakyatnya, dia pernah berjalan malam hari dengan pakaian yang orang lain tidak mengenalinya agar tidak dihormati, ketika sampai disebuah gubuk miskin Umar mendengar keluhan seorang ibu tentang kemiskinannya, diperiksanya dapur yang bagi masyarakat waktu itu diletakkan diluar, tampaklah belanga dijerangkan diatas tungku tanpa ada gandum ataupun beras bersama air, ibu itu hanya merebus batu.³²

Untuk menentukan syarat-syarat bagi orang yang akan menjabat sebagai Gubernur/Wali negeri dan petugas yang diutus waktu itu, Khalifah melaksanakan cara sebagai berikut:

³²*Ibid.*, h. 250

Khalifah Umar Ibn Al-Khattab berkata: “Tunjukkanlah kepada saya seorang laki-laki yang akan saya angkat”. Mereka (sahabat-sahabatnya) balik bertanya: “apa syarat-syarat yang harus dipunyai orang itu?” jawabnya: “ Apabila dia berada dalam suatu kaum sedang dia bukan pemimpinnya maka seolah-olah dia memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan (penuh prakarsa dan loyalitas). Dan apabila dia menjadi pemimpin mereka maka dia seolah-olah salah seorang dari mereka (terjun langsung kelapangan).

Umar merupakan pemimpin yang memiliki seni mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dengan orang-orang yang pada tempatnya, berpengalaman bahkan juga orang-orang yang berlawanan dengan perasaan dan pemikiran beliau.

3. Pemerintahan Utsman bin Affan RA

Utsman mulai memangku jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan pada usia 70 tahun, terpilih dengan suara terbanyak menggantikan Umar bin Khattab, tepatnya Utsman memerintah selama 12 tahun yaitu dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi atau dari tahun 24 sampai dengan 36 Hijriah.

Khalifah yang pada masa pemerintahannya, Al-Quran dibukukan ini memang lebih memprihatinkan pembinaan mental. Misalnya begitu beliau melihat baitul mal penuh maka beliau menambah pemberian (jatah) dan mengambil untuk masjid, yang disajikan dalam bentuk

makanan yang tetap, bagi orang-orang yang itikaf, beribadah, dan Ibnu Sabil.

Apabila Maududi menilai Khalifah Utsman dalam penerimaan pegawai dan pengangkatan pejabat cenderung memprioritaskan saudaranya sehingga menimbulkan ikatan primordial yang tidak berkembang, dekat dengan spoil sistem. Dalam menanggulangi tuntutan masyarakat, mengagregasikan dan mengartikulasi kepentingan, beliau lebih mengutamakan responsivitas daripada efektivitas. Hingga dimasa khalifah Utsman partai-partai politik tumbuh dan berkembang. Keadaan ini karena kekuasaan Islam semakin meluas sampai ke seantero Jazirah Arab, Irak, Syiria, Mesir, Afrika, Armenia, Persia, dan kepulauan Mediterania, yang pada setiap tempat tersebut memiliki beraneka ragam ras.³³ Berlainan, dengan Maududi, Khalid Muhammad Khalid menilai bahwa Khalifah Utsman mengangkat para gubernur dan wali negeri adalah berdasarkan permintaan dan usul masyarakat setempat.

Contoh keadaan di Indonesia, apabila kepentingan daerah yang diutamakan dimana pemberian otonomi seluas-luasnya. Seperti keadaan RI waktu berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada UUDA 1950, dimana pengawasan pusat terhadap daerah lemah, kepala daerah dan gubernur terpisah sama sekali. Akan tetapi bila daerah

³³*Ibid.*, h. 258

dikuasai sepenuhnya oleh pusat, keterpimpinan seperti ini dapat mengarah kepada Negara tirai besi. Oleh sebab itu, sebagai jalan tengah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sekarang ini, melaksanakan desentralisasi bersama-sama dengan dekonsentrasi, dengan begitu pemberian otonomi kepada daerah, pelaksanaannya mesti nyata dan bertanggung jawab. Inilah yang berlangsung selama orde baru, setelah reformasi bangsa Indonesia merasa cukup dewasa untuk melakukan otonomi daerah dibentuklah UU No 22 Tahun 1999.

Khalifah Utsman saat pengangkatan gubernur dan jabatan lainnya yang sudah berumur tua. Tabiat beliau yang sejak muda dermawan, tenang dan aman dari amarah membuat para amir di daerah bertindak leluasa seakan-akan tidak diawasi. Khalifah tidaklah memandang para pejabatnya tidak terlepas dari berbagai kesalahan besar yang menyebabkan mereka dipecat. Kekurangan pengawasan seperti ini menyebabkan daerah semakin sentrafugal menjauhi pusat dan berbagai pemberontakan separatis cenderung timbul. Fitnah kepada pusat (seperti yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba') berjalan lancar (ingat RI sebelum Dekrit 1959).

4. Pemerintahan Ali bin Abu Thalib RA

Ali mulai memangku jabatan kepala Negara dan kepala pemerintahan pada usia 56 tahun, terpilih dengan suara terbanyak menggantikan Utsman bin Affan, tepatnya Ali memerintah selama 6

tahun yaitu dari 656 sampai dengan 661 Masehi atau dari tahun 36 sampai dengan 41 Hijriah.

Ali menjadi khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam Mahzab Sunni dan juga menjadi Imam pertama dalam kepemimpinan Islam Mahzab Syiah. Kepemimpinannya sebagai khalifah menempati posisi yang rumit, bukan saja pemberontakan belum reda seluruhnya, tetapi juga Muawiyah yang dari setapak ke setapak memperoleh kekuasaan semakin kuat di utara dan timur laut Madinah, dan tidak berkenan menjadi subordinat atau pemerintah daerah dari pemerintahan Islam Madinah tetapi seakan-akan menjadikan daerahnya sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdiri sendiri.

Oposisi yang dilakukan Ali terhadap tiga Khalifah sebelum beliau adalah ditujukan untuk meluruskan jalannya roda pemerintahan, dan lebih dari pada itu tidak sedikit bantuan Ali pada masa pemerintahan sebelum beliau menjabat kepala pemerintahan.³⁴

B. Mekanisme Pemilihan dalam Fiqh Siyasah

Al-Mawardi menyebut dua mekanisme pengangkatan seorang imam atau pemimpin Islam yaitu: pertama, dengan cara pemilihan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, “mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai”, atau yang disebut “Ahl al-ikhtiar”; kedua, penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya. Cara kedua ini terjadi

³⁴*Ibid.*, h. 262

ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar Asy-Shidiq kepada Umar bin Khatab.³⁵

Allah melalui Rasul-Nya telah memberikan contoh bagaimana cara memilih pemimpin dalam sistem Islam. Dan satu-satunya metode yang diakui oleh Islam dalam mengangkat kepala negara adalah dengan *baiat*. Dari baiat ini akan diperoleh seorang pemimpin (khalifah) yang akan merangkul dan menyatukan seluruh kaum muslimin, dibawah pemerintahannya, dalam perspektif syariat Islam kondisi masyarakat bukanlah dasar untuk menentukan status hukum suatu perkara. Baiat adalah akad sukarela antara rakyat orang yang di percaya untuk menjadi kepala negara yang akan memerintah mereka berdasarkan hukum-hukum Allah. Karena itu bisa dikatakan baiat adalah satu-satunya metode pengangkatan kepala negara dalam sistem Islam.

Model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rashidin.³⁶

a. Model pemilihan Abu Bakar (632-634 M)

Sepeninggal Rasulullah Abu Bakar menjadi khalifah penggantinya dengan cara Demokrasi/Musyawah/Konsensus antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Adapun dasar kesepakatan tersebut adalah:

- 1) Abu Bakar adalah orang pertama orang yang mengakui peristiwa Isra' Mikraj.

³⁵Syarifuddin Jurdin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 67.

³⁶A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Jilid III al husna Zikir, 2000),h. 20

2) Beliau juga orang yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yastrib.

3) Ia juga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam dan ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar menggantikannya sebagai imam.

Adapun proses pemilihannya adalah, pada awalnya kaum Anshar menawarkan Said bin Ubaidah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah serta berkata kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin.³⁷ Kemudian Umar menolak usulan dari Abu Bakar dan berkata Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin, dan setelah sekian lama perdebatan akhirnya keputusan jatuh kepada Abu Bakar dan Umar mengucapkan sumpah setia nya lalu diikuti oleh Saad in Ubaidah dan diikuti oleh seluruh umat Islam.

b. Model pemilihan Umar bin Khattab (634-644 M)

Adapun pemilihan Umar bin Khattab sebagai berikut:

1) Penunjukkan Abu Bakar dengan persetujuan rakyat

Abu Bakar sebagai khalifah pertama menunjuk Umar sebagai Khalifah penggantinya, penunjukan tersebut berdasarkan

³⁷ Siti Mahmudah, *Sejarah Peradaban Islam*, (Lampung: fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan), h. 61

dengan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Ustman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak.

2) Proses Pemilihan

Ketika Abu Bakar dalam keadaan sakit dia menyeru kepada Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang mana yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan dikalangan umat Islam untuk masalah khalifah.

Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah, sehingga keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat muslim.

c. Model Pemilihan Ustman bin Affan (644-656 M)

Adapun proses pemilihan Ustman bin Affan adaah sebagai berikut:

1) Berdasarkan kesepakatan dewan majelis dan pemungutan suara terhadap dua calon khalifah

Berbeda dengan Umar bin Khattab, pemilihan Ustman berdasarkan kepada konsensus dewan pemilihan khalifah dan juga terdapat dua kandidat kuat yaitu Ustman bin Affan dan juga Ali bin

Abi Thalib yang mana pada akhirnya terpilih Ustman sebagai khalifah.

2) Proses Pemilihan

Sebelum Umar wafat karena ditikam oleh seorang budak Persia ia telah membentuk sebuah dewan formatur yang bertugas untuk memilih khalifah baru, dewan tersebut terdiri dari Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Saad bin Abi Waqqas.

Setelah Umar bin Khattab wafat dewan yang telah dibentuk tersebut mengadakan rapat, dan dari keenam dewan tersebut empat diantaranya mengundurkan diri dan tinggalah dua calon kuat yakni, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun demikian karena kedua orang yang sangat mulia ini tidak gila terhadap kekuasaan dan jabatan mereka saling menuding dan beranggapan bahwa mereka tidak lebih baik dari lawannya, sehingga Ali menunjuk Ustman sebagai khalifah dan begitu juga sebaliknya.

Karena kejadian tersebut Abdurrahman bin Auf meminta kepada dewan formatur agar dapat ditunda, dengan tujuan menanyakan persetujuan masyarakat ketika itu. Dan pada akhirnya Ustman yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab.

d. Model pemilihan Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Secara umum dasar pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sama dengan pemilihan Ustman bin Affan, hanya saja calon pada masa ini hanya Ali yang menjadi calon tunggal dari dewan pemilihan khalifah.

Proses awal terjadinya pemilihan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya Ali menolak untuk diangkat menjadi khalifah, karena melihat dari berbagai sisi dan berbagai pertimbangan pada akhirnya beliau menyetujuinya.
- 2) Namun demikian, terpilihnya Ali sebagai khalifah menyisakan beberapa kelompok pemberontak, yang menuntut agar pembunuhan Utsman bin Affan diusut dan pembunuhnya dihukum.

Empat metode pengisian jabatan kepala negara yang masing-masing diterapkan dalam pengangkatan Khulafa al- Rasyidin, menurut Jimly Assiddiqie, diidealkan sebagai pilihan metode suksesi damai. Meskipun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sejauh menyangkut keabsahan secara sosiologis, keempatnya mendapatkan dukungan luas di antara para sahabat dan kekuasaan yang berhasil dibangun terbukti efektif dalam sejarah.³⁸

Cara yang kedua yaitu melalui syura, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau

³⁸Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2002), h. 17

pemerintahan. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain: prinsip musyawarah (syura'), prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip kesamaan, dan prinsip ketaatan. Dalam hal ini syura', atau musyawarah dalam pemilihan pemimpin dalam Islam sangat dibutuhkan mengingat musyawarah adalah bagian dari prinsip-prinsip yang Erlangga harus di pegang dalam pemilihan pemimpin.

Di dalam ensiklopedia Islam Indonesia, kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Dalam musyawarah terkadang Nabi hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli dan cendekiawan, dan terkadang pula hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi bila masalah penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan.³⁹

C. Dalil dan Metode Ijtihad dan Kaidah Tasyri'iyah

1. Dalil-dalil

- a. Ayat Al-Qur'an dalam memilih pemimpin yang adil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

³⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 89-90

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8)

Dalam surah Al-Maidah Ayat 8 dijelaskan keadilan diserukan Al-Qur'an pada dasarnya mencakup keadilan dibidang ekonomi, social dan terlebih lagi dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum, memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah putri beliau sendiri, Fatimah misalnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(An-Nisaa: 58)

Di dalam surah An-Nisa' ayat 58 juga dijelaskan pengertian adil adalah pemimpin yang adil kepada dirinya dan adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Adil kepada dirinya berarti seorang pemimpin harus dekat kepada Allah SWT, sehingga

dirinya terhindar dari perbuatan dosa, memiliki sifat hati-hati yang tidak terobsesi mengejar kepentingan dunia dan dapat dipercaya dalam memegang amanah.

b. Hadis dalam memilih pemimpin yang adil dan jujur

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُنِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Dari Abdullah Amr bin al-Ash RA, ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda” sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah laksana berada diatas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukum kepada keluarga dan rakyat yang mereka kuasai (perintah).’

(HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ

امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِيَّيَّيْ أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Abu hurairah r.a: berkata: bersabda Nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah: Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. (H.R Bukhari dan muslim)⁴⁰

c. Kaidah-kaidah Fiqh لَا ضَرَّ رَ وَلَا ضَرَّارَ beserta penjelasannya

Al-Darurat (kebutuhan darurat) yaitu kemashlahatan yang menjadi faktor penentu berlangsungnya kehidupan manusia, baik menyangkut kehidupan dunia, maupun kehidupan akhirat. Sekiranya Mashlahat pada tingkatan ini tidak terjaga, maka akan menyebabkan kehidupan dunia menjadi kacau dan tidak normal yang akhirnya berujung pada kehampaan dan kesia-siaan, serta

⁴⁰Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014), h.536

menyebabkan penderitaan diakhirat.⁴¹ Dharuriyat artinya harus ada demi kemashlahatan hamba, jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Kemashlahatan tersebut adalah menjaga 5 (lima) tujuan pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri).⁴²

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab Suci, kepada Malaikat, kepada hari akhir, melakukan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah dalam kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, manusia juga berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fardhu" (menurut ulama hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum

⁴¹Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyah dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 118

⁴²Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 Juli 2013, h. 242.

yang ditimbulkan termasuk *haram dzati*. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan *dharuri* ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang teruai dalam kitab-kitab fiqh.⁴³

Pengertian *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* itu sendiri adalah tidak boleh memudharatkan dan membalas kemudharatan. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan "*dharar*" dan "*dhirar*" yaitu menurut Al-Husaini mengartikan *dharar* yaitu bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu (orang lain) ada mudharat, sedangkan *dhirar* diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudharatkan. Misalnya: seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya akan tetapi menyebabkan kerapuhan tembok dinding rumah tetangganya sehingga dapat membuat rumahnya roboh, maka pembuatan saluran air seperti ini tidak dibolehkan karena mengingat begitu jelas bahayanya.

d. Kaidah *درع المفسد مقدم على جلب المصالح*

Pengertian kaidah diatas adalah meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang mashlahat dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi musholih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah mashlahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja

⁴³Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 247

manusia itu ada yang membawa kepada kemashlahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat.⁴⁴

Kaidah ini dapat digunakan untuk menetapkan hukum apakah boleh atau haram. Jika sesuatu mengandung mudharat dan manfaat, maka yang diperhatikan dalam penetapan hukumnya adalah kemudharatannya, meskipun terdapat manfaatnya.

Ulama ushul fiqh membagi mashlahah pada tiga bagian yaitu:

- a. *Jalbul Masholih*, apabila menghadapi mashlahat pada waktu yang sama, dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling mashlahat. Contoh: menghormati tamu adalah suatu yang mashlahat, wiridan setelah sholat juga mashlahat, lalu ketika kita sehabis sholat dan ada seorang tamu yang datang, maka temuilah tamu itu dan tinggalkanlah wiridan karena menghormati tamu adalah sesuatu yang membawa mashlahat bagi kita pribadi juga bagi sang tamu sendiri. Sedangkan mashlahat dari wiridan adalah hanya untuk diri kita sendiri.
- b. *Mashlahah dar'ul mafasid* (mashlahah daharuraat) apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadat berarti mengejar mashlahat. Contohnya: seorang ibu yang sedang hamil

⁴⁴ Dari buku A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 27, dikutip dari <https://Bocah.hukum.blogspot.com/2018/06/Kaidah-Jalbu-Al-Mashalih-wa-Daf'ul-Al.html>, Diakses pada Tanggal 19 Januari 2019.

mengalami kontraksi yang sangat parah sampai akhirnya dokter memberikan pilihan kepada keluarga tersebut untuk memilih salah satu jiwa yang harus dikorbankan. Dalam kasus ini maka yang harus dikorbankan adalah sang anak karena ketika menyelamatkan seorang ibu kemungkinan sang ibu bisa hamil kembali. Tapi ketika yang diselamatkan sang anak, anak tersebut hanya akan dibesarkan oleh sang ayah seorang.

c. **درع المفساد مقدم علي جلب المصالح** apabila terkumpul antara mashlahat dan mafsadat dan antara mashlahat dn mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama dari pda meraih mashlahat. Contoh: pada suasana panas, tidak berkumur dalam wudhu ketika berpuasa. Berkumur ketika berwudhu adalah suatu hal yang sunah, namun ketika melakukan kumur-kumur ketika berwudhu dikhawatirkan akan membatalkan puasa, maka lebih baik tinggalkanlah kumur-kumur tersebut.⁴⁵

2. Metode Ijtihad

Para mujtahid menggunakan konsep masalah mursalah dalam menghasilkan produk-produk hukum karena mereka semua sepakat bahwa syari'at Islam telah membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu menjawab berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang selalu berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah لَا يَنْكُلُ تَخْيُّلُ أَحَكَمُ بِ تَخْيُّلُ أَرْمَن (perubahan situasi

⁴⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra).

dan kondisi (adat dan tradisi) suatu zaman berpengaruh besar terhadap sejumlah besar hukum-hukum syar'i yang ditetapkan berdasarkan ijtihad)".⁴⁶

Menurut istilah umum *Maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya. *Maslahah* juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁴⁷

Dalam perspektif fikih siyasah, konsep mekanisme calon perseorangan sesuai dengan konsep *maslahah ammah*, *hurriyah al-ra'y*, dan *hurriyah al-syakhsiyyah*:

1. *Maslahah Ammah*

Maslahah 'ammah adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Kemashlahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyyah, sehingga kebijakan apapun maupun perundang-

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), h. 16

⁴⁷Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol.XII, No. 1 Juni 2014, h. 65

undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, apakah menimbulkan kemashlahatan bagi umat atau malah sebaliknya. Dalam hal ini calon perseorangan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentunya tidak ditolak keberadaannya secara syari'at ini dikarenakan tidak semua keinginan serta kepentingan warga dan masyarakat terakomodasi dengan adanya partai politik sehingga sangat diperlukan orang yang tidak terafiliasi dengan partai dalam arti pencalonan perseorangan untuk menjaga kemashlahatan umat ini. Keputusan baru yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Mahkamah Konstitusi telah memenuhi persyaratan kemashlahatan ummat yang harus terjaga dibanding kepentingan pribadi partai-partai politik tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa apabila UU atau ketentuan yang sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, maka harus dirubah. Meskipun secara politis kepala daerah dari calon perseorangan mendapatkan dukungan politis secara minoritas di lembaga DPRD, namun jika kepala daerah tersebut dapat menunjukkan prestasi kerja dan pengabdian kepada masyarakat di daerahnya dengan penuh tanggungjawab dan dapat mensejahterakan rakyatnya, serta tidak

melanggar hukum dalam kinerjanya sebagai kepala daerah, maka kepala daerah tersebut walaupun berasal dari calon perseorangan semestinya juga akan memperoleh dukungan politik dari para anggota DPRD dan dukungan moral dari rakyat yang dipimpinnya, karena kemampuan tersebut berarti berusaha melindungi kemashlahatan masyarakat yang lebih luas, yang lebih utama dari segelintir orang saja.⁴⁸

2. *Hurriyyah al-Ra'y* (Kebebasan Berpendapat)

Dalam kerangka fiqh Islam, kebebasan mengemukakan pendapat biasa disebut dengan istilah *hurriyyah al-ra'y*, yang secara etimologis berarti kebebasan berpendapat yang juga berarti kebebasan berbicara. Penggunaan istilah *hurriyyah al-ra'y* dan bukan *hurriyyah al-qawl* menunjukkan bahwa para ulama dan sarjana muslim telah menempatkan kedudukan yang amat penting dalam tradisi pemikiran dan keilmuan Islam. Istilah *ra'y* dalam tradisi pemikiran dan keilmuan Islam biasanya terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu yang terpuji, tercela, dan di ragukan.

Setiap orang boleh mengemukakan pendapat sejauh tidak melanggar hukum yang mengandung penghujatan dan fitnah, serta didasarkan pada argumen yang logis, faktual bertanggung jawab. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi serta sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal

⁴⁸Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyyah)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 1, No.2, (Oktober 2011), h. 167

28E Ayat 3 bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...” ini sejalan dengan corak demokrasi Indonesia sehingga dalam keadaan pemilihan kepala daerah siapapun berhak menyatakan dirinya untuk maju sebagai calon kepala daerah dengan atau tanpa partai politik. Ketentuan ini mengakomodasi setiap hak-hak asasi warga negara yang ingin memajukan bangsa dan negaranya serta tidak terafiliasi dengan partai politik manapun tetapi tetap bercita-cita memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.⁴⁹

3. *Hurriyyah Al-Syakhsiyyah* (kebebasan berperilaku)

Dalam UUD NRI Pasal 28E Ayat 2 ditegaskan bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan juga Pasal 28I Ayat 1 hak untuk hidup, ...hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ...hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum...”⁵⁰

Di dalam Islam, secara khusus Hukum Tata Negara Islam ketentuan ini dikenal dengan *Hurriyyah Al-Syakhsiyyah* dalam arti kebebasan berperilaku secara khusus dan Hak-Hak Asasi Manusia yang secara umum yang telah diatur dalam Islam juga. Siapapun diberikan hak sebesar-besarnya untuk berperilaku secara bebas namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orangnya wajib tunduk atas batasan-batasan yang telah diberikan

⁴⁹Sri Warjiati, “ Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No 1, (April 2014), h. 128

⁵⁰Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (2)

oleh agama maupun negara yang terejawantah di dalam undang-undang dan nilai-nilai keislaman dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama dan kebangsaan dan ketertiban atau kemashlahatan umat.

Kepala daerah yang bertindak sebagai pengontrol, pemimpin, dan pengawas bagi berjalannya kebebasan itu sudah seharusnya juga dipilih berdasarkan asas kebebasan tersebut. Tidak ada yang boleh melarang siapapun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu melalui partai ataupun melalui jalan perseorangan karena itu akan melanggar kebebasan dan hak warga negara untuk membela negaranya. Kebutuhan untuk menjalankan pemilihan kepala daerah langsung dengan sistem yang ditentukan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan amanat dari konstitusi hasil amandemen kedua, kendati tidak secara tegas dinyatakan kata-kata pemilihan secara langsung. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua menyatakan bahwa "gubernur, bupati, walikota, merupakan masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Perkataan dipilih demokratis dapat ditafsirkan secara luas. Yang dapat saja ditafsirkan dipilih secara langsung melalui sistem perwakilan DPRD pada semua

tingkatannya. Melihat hal ini Islam sangat mengedepankan kemashlahatan luas bagi rakyat untuk memilih siapa calon pemimpinnya baik itu dari partai maupun tidak. Logikanya, apabila partai politik sudah tidak bisa lagi menjaga kemashlahatan tersebut dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya terhadap rakyat secara sosial maka alternatif lain berupa pilihan calon perseorangan non-partai menjadi pilihan yang telah sesuai dengan asas perlakuan tanpa deskriminasi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia bagi calon pemimpin yang tidak berafiliasi dengan partai.⁵¹

3. Kaidah Tasyri'iyah

Qaidah Tasyri'iyah terdiri dari dua kata yaitu qaidah dan Al-Tasyri'iyah. Qaidah berarti pokok atau dasar, tasyri'iyah dalam bahasa arab berarti membuat jalan raya. Terdapat dua macam tasyri', antara lain tasyri' samawiy dan tasyri' wad'iy. Tasyri' samawiy adalah peraturan perundang-undangan yang murni dari pembuat hukum, yaitu Allah. Sedangkan tasyri' wad'iy adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dirumuskan oleh manusia yang didasarkan atau dengan referensi tasyri' samawiy. Kaidah perundang-undangan yang dalam istilah ahli ushul fiqh dikenal dengan nama Qawaid Tasyri'iyah ialah tata aturan yang dibuat pedoman oleh pembuat undang-undang dalam

⁵¹*Ibid.*, h. 131

menyusun undang-undang dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapainya melalui pemberian beban kewajiban kepada orang-orang mukallaf.⁵²

Undang-undang secara garis besar ada dua macam, yaitu Qanun Tasyri'i (peraturan perundangan) dan Qanun Ijra'i (peraturan prosedural). Qanun tasyri'i (peraturan perundangan) adalah undang-undang yang materinya berupa hukum syara', atau aqidah, atau kaidah kulliyah syar'iyah, atau sumber-sumber hukum syara'. Sedangkan Qanun Ijra'i (peraturan prosedural) adalah undang-undang yang materinya berkaitan dengan sekumpulan cara, sarana, dan alat untuk melaksanakan hukum syara' tertentu. Para ulama ushul Fiqh memperoleh kaidah-kaidah tasyri'iyah (kaidah-kaidah perundang-undangan) setelah mengadakan penelitian terhadap hukum-hukum syariat, hikmah, illat, dan sebab-sebab disyariatkan suatu hukum, terhadap nash-nash yang menetapkan dasar-dasar pembuatan syariat secara umum dan terperinci dan mengistimbatkan hukum dari nash-nash tersebut dan dari peristiwa yang belum ada nashnya, agar perundang-undangan tersebut dapat merealisasikan tujuan syariat dalam mewujudkan kemashlahatan dan keadilan dan menghindarkan kerusakan dan ketidakadilan diantara manusia.

Yang termasuk kaidah tasyri'iyah yang sesuai dengan penjelasan ini yaitu metode Istishlah yang berupa Mashlahat. Mashlahat secara etimologi adalah berasal dari akar kata tunggal Al-

⁵²Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 331

Mashalih sama artinya dengan Al-Shalah, yaitu mendatangkan kebaikan. Jadi mashlahah itu sendiri setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudharatan.⁵³ Adapun mashlahat secara kategoris dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu setiap mashlahat yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash, ijma', atau qiyas, atau qiyas karena ada 'illat hukumnya yang diakui. Contohnya Allah mensyariatkan hukum qishash bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.
- b. *Mashlahah mulghah*, yaitu setiap mashlahat yang terdapat dalam suatu peristiwa tetapi mashlahat itu diabaikan/ di batalkan oleh syariat karena dalam peristiwa itu mudharat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Contohnya di dalam minuman khamar itu ada manfaatnya yaitu bisa merangsang jiwa lebih energik, kuat, dan berani.
- c. *Mashlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang timbul setelah Nabi S.A.W. wafat, dan mashlahat tersebut di akui dan tidak berlawanan dengan syariat, atau dengan kata lain mashlahah mursalah adalah menetapkan hukum pada suatu masalah berdasarkan prinsip meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syariat,

⁵³Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-kasus Hukum Islam*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016), h. 54

tetapi hal itu bila dilakukan benar-benar mendatangkan kemashlahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan manfaat atau menghilangkan mudarat.⁵⁴

Para ahli fiqh berpendapat bahwa mashlahat Al-‘ammah itu hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syari’at, walau syari’at dari nash. Jika mashlahat itu kontradiksi dengan nash atau ijma’ hendaklah diutamakan mashlahat betapapun kuatnya nash, karena menurutnya mashlahat itu merupakan tujuan yang dimaksud Allah, sedangkan dalil itu tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, maka tujuan itu harus lebih dipentingkan dari alat.⁵⁵

D. Perkembangan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, kita lihat pasal 18 UUD 1945, dengan penjelasannya, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah, yang pelaksanaannya diatur dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974.

⁵⁴*Ibid.*, h. 57

⁵⁵*Ibid.*, h. 58

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “ pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

1. Kepala Daerah

Menurut Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya seperti gubernur, bupati, dan walikomadya, serta DPRD. Kedudukan kepala daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD memimpin bidang legislative. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD.

Mengingat luasnya tugas yang dihadapi oleh kepala daerah, perlu diadakan wakil kepala daerah. Akan tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan wakil kepala daerah diadakan menurut kebutuhan. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan kepala daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.⁵⁶

2. Pemilihan Kepala Daerah

⁵⁶C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 363

Tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat I dan sekurang-kurangnya tiga orang calon dan sebanyak-banyaknya lima orang calon. Hasil pemilihan DPRD itu, sekurang-kurangnya dua orang calon, disampaikan oleh DPRD kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Presiden mengangkat salah seorang diantara kedua calon itu sebagai gubernur kepala daerah tingkat I.
- b. Kepala daerah tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat II dari sekurang-kurangnya tiga orang calon dan sebanyak-banyaknya lima orang calon. Hasil pemilihan calon DPRD itu, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang calon, diajukan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur kepala daerah tingkat I salah seorang diantara kedua calon itu diangkat sebagai kepala daerah tingkat II (bupati atau walikotamadya).

Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintahan Pusat merupakan penguasa tunggal sehingga ia disebut kepala wilayah. Tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum atau urusan Pemerintahan Pusat yang sebenarnya menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan bukan kepada DPRD. Dalam menjalankan tugasnya itu, kepala wilayah dibantu oleh sebuah sekretariat dibawah pimpinan seorang sekretaris wilayah yang diangkat oleh Pemerintah Pusat.

Kepala daerah sebagai kepala daerah otonom juga menjadi wakil daerahnya karena ia telah mendapat dukungan dari rakyatnya di daerah. Setiap kepala daerah, sebelum diangkat, dicalonkan dan dipilih oleh kepala daerah otonomi lurus dapat bekerja sama dengan seerat-eratnya dengan DPRD, seperti didalam:

- a. Pembuatan peraturan daerah,
- b. Pembuatan dan penetapan APBD
- c. Pemberian keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.⁵⁷

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini disebutkan ini sebagai aturan tentang Pemerintahan Daerah. Jimly Assiddiqie berkomentar tentang penggunaan kata pemerintah, pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan daerah, tentu saja arti dan kandungan satu sama lain berbeda. Dalam ketentuan umum Undang-Undang ini merumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat, yaitu presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedang kata pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

⁵⁷Sri soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2014), h. 56

Dalam rangka mengatasi berbagai kesulitan sebagai akibat kelemahan undang-undang pemerintahan terdahulu, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, maka dibuatlah undang-undang yang baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak lagi seperti dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/ walikota tidak memiliki hubungan hirarkis satu dengan yang lain. Sedangkan isi UU No. 32 Tahun 2004 tidak seperti itu, justru berisi sebaliknya. Hal lain yang cukup penting dan strategis dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan.⁵⁸

Sejarah menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah mempunyai sistem yang tidak stabil sebab sistem menyesuaikan dengan situasi zaman, beradaptasi dengan tradisi, sistem ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

a. Masa Hindia Belanda

Pada masa Belanda dan Jepang tidak ada pemilu untuk menentukan pemimpin di tiap tingkatan karena semua ditentukan pemerintah kolonial, yaitu Gubernur Jenderal. Pada zaman Belanda

⁵⁸Khairuddin dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*,(Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h. 98.

pengaturan tentang pemerintahan di daerah umumnya dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan diluar Jawa dan Madura sesuai dengan politik penjajahannya. Di Jawa dan Madura dibagi menjadi lima tingkatan, tingkatan yang tertinggi disebut provinsi atau *gewest* yang dipimpin oleh Gubernur. Di Kabupaten yang dibagi menjadi beberapa kewedanan yang dipimpin oleh seorang Wedana. Di kecamatan dikepalai oleh Camat atau asisten Wedana. Di desa dikepalai oleh kepala desa.

Adapun untuk daerah luar Jawa dan Madura yang tertinggi disebut provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi beberapa residen. Setiap kewedanan dipimpin oleh seorang Wedan atau Demang. Setiap wedan dibagi beberapa kecamatan yang dipimpin oleh Camat, dan disetiap kecamatan di bagi berbagai desa yang dipimpin oleh kepala desa. Baik untuk Jawa dan Madura maupun diluar Jawa dan Madura jabatan-jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen dan Kontrolir harus dijabat oleh orang Belanda, sedangkan untuk jabatan-jabatan lainnya dipegang oleh orang Indonesia.⁵⁹

b. Masa Kemerdekaan

Kepala daerah berfungsi sebagai komite nasional daerah, sekaligus menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua badan perwakilan daerah. Pada masa ini gubernur diangkat oleh presiden

⁵⁹ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h. 23

setelah ada nama calon yang diajukan DPRD tingkat provinsi, Bupati diangkat oleh menteri dalam negeri, dan kepala desa diangkat oleh Gubernur.⁶⁰

c. Masa Orde Lama

Sistem pemilihan kepala daerah kembali berubah bersamaan dengan berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Pada era ini istilah tingkatan pemerintahan diubah, daerah tingkat I (provinsi) dipimpin oleh Gubernur, daerah tingkat II (kabupaten/kota) dipimpin oleh Bupati atau Walikota, dan tingkat III dipimpin oleh camat.

d. Masa Orde Baru

Pada masa kepemimpinan Soeharto mengukuhkan dominasi atas pemerintahan daerah, sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kepala daerah diangkat oleh presiden, yang mekanismenya di DPRD juga dikontrol oleh presiden. Aturan tersebut terkait dengan kepentingan pemerintah daerah untuk mendapatkan gubernur/bupati yang mampu bekerja sama.

e. Masa Reformasi

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999 segera merubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di masa ini, kepala

⁶⁰*Ibid.*, h. 29

daerah dipilih langsung oleh DPRD tanpa campur tangan pemerintah pusat. Banyaknya praktik politik uang untuk membeli suara menciptakan opini publik. Undang-undang tersebut kemudian direvisi setelah banyaknya kritik tentang politik uang tersebut yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung.⁶¹

Penerbitan perpu Nomor 3 Tahun 2005, tentang pedoman pelaksanaan pemilu secara langsung setelah diadakannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Para calon adalah calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dukungan minimal 15% kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah pada pemilu legislatif. Undang-undang tersebut lalu direvisi dan diganti dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Undang-Undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, perubahan mencolok adalah diperbolehkannya calon perseorangan menjadi calon kepala daerah dalam pilkada secara langsung.⁶² Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum

⁶¹ *Ibid.*, h. 34

⁶² C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan

anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Undang-undang terbaru yang membahas tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya yaitu calon perseorangan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 27 yang berbunyi “*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*”⁶³

Sistem yang dianut dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan sistem pemilihan langsung oleh pemilik berdasarkan suara mayoritas absolut dan mayoritas sederhana. Hal ini disebut juga *plural majority* dengan *two round system*.⁶⁴ Para pemilih melakukan pencoblosan tanda gambar pasangan kandidat yang diinginkan sesuai keinginan nurani mereka. Pasangan calon yang memperoleh suara 25% lebih atau disebut juga mayoritas sederhana dapat ditetapkan sebagai pemenang, jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara 50% atau lebih, atau disebut dengan istilah mayoritas mutlak.

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

⁶³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat 27

⁶⁴ I Ketut Putra Erawan, *Logika Perubahan dan Keterlanjutan Sistem Pemilihan Umum bagi Indonesia*, (Jakarta: 2009), h. 10

1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (3), serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316);

Mengadili:

[1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[2] Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TNLRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu:

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, “ *pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*”.
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa, “*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*”.
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa, “*sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)*”.

- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa, *“partai politik atau gabungan partai politik wajib”*, frasa *“yang seluas-luasnya”*, dan frasa *“dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”*.⁶⁵

[3] Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu;

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, *“ pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”*,
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa, *“ yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”*;
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa, *“ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”*;
- Pasal 53 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa, *“ Partai politik atau gabungan partai politik wajib ”, frasa ” yang seluas-luasnya ”, dan frasa “ dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”*;

[4] Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125,

⁶⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah, h. 17

TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 59 Ayat (1): *" Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon "*;
- Pasal 59 Ayat (2): *" Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan "*;
- Pasal 59 Ayat (3): *" Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan "*.

[5] Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

[6] Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya⁶⁶

2. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

[1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara sebelumnya. Pada pokoknya, Pemohon mendalikan bahwa

⁶⁶*Ibid.*, h. 18

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) huruf a, Ayat (5) huruf c dan Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) DAN Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hak Pemohon tersebut berupa hak untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol, sehingga pasal-pasal yang sebagaimana tercantum dalam UU Pemda hanya membuka pencalonan kepala daerah melalui parpol harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama, apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan

- Pemohon;Kedua, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut diatas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003).⁶⁷

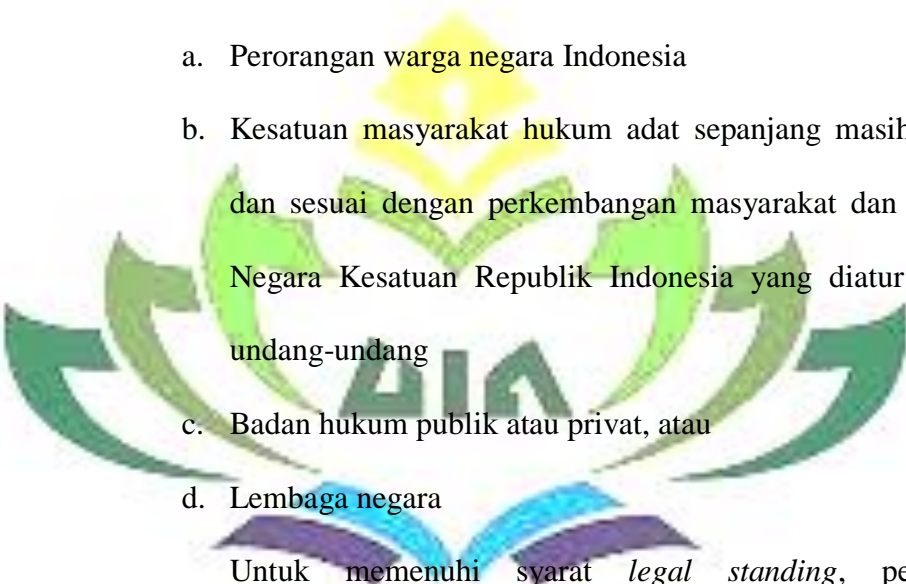
Sebagian pasal-pasal yang sudah dimohonkan pengujian sudah pernah diuji oleh Mahkamah dengan amar putusan menolak permohonan, yakni Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang penda dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005, maka apakah cukup alasan bagi Mahkamah untuk dapat menguji kembali pasal-pasal *a quo* karna adanya Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2006 (hal tersebut disebut dengan PMK 06), hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Sedangkan pasal-pasal lainnya yang dimohonkan pengujiannya, meskipun sudah pernah diuji dalam perkara Nomor 06/PUU-

⁶⁷*Ibid.*, h. 6

III/2005, tetapi karena amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka pasal-pasal tersebut masih bisa diuji oleh Mahkamah.

Kedudukan Hukum

Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah

- 
- a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaga negara

Untuk memenuhi syarat *legal standing*, pemohon menganggap hak/konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Pemohon yaitu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah, karena memang pemilihan kepala daerah ditempat Pemohon bertempat tinggal masih belum diselenggarakan. Namun, dapat dipastikan bahwa apabila masa

pemilihan kepala daerah tiba dan Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah tidak melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana telah ditentukan oleh UU Pemda, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pasti akan menolak pendaftaran pemohon. Pemohon berpendapat apabila ketentuan dalam UU Pemda tidak membatasi pencalonan kepala daerah hanya melalui parpol atau gabungan parpol, tetapi juga membuka bagi calon perseorangan maka hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan. Oleh karenanya, Pemohon memohon agar ketentuan yang membatasi pencalonan kepala daerah yang hanya melalui parpol atau gabungan parpol dinyatakan oleh Mahkamah sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai legal standing dapat diterima, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda *a quo* kepada Mahkamah.

3. Syarat Calon Perseorangan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Mahkamah berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga

negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.⁶⁸

Calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut: ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut: a. Pasal 56 Ayat (2) berbunyi, " Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada politik" dihapus seluruhnya, karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, dengan hapusnya Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat dan berbunyi, " Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"; pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, " yang diusulkan secara berpasangan oleh pa karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, " Peserta pemilihan kepala

⁶⁸*Ibid.*, h. 14

daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon” ; Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, ” sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, hal ini se bunyi Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, Partai politik atau gabung an partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perole han suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Dengan emikian, Pasal 59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada; Pasal 59 Ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi, ” Partai politik atau gabungan partai politik seluas-luasnya”, dan frasa yang berbunyi, ”dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”, sehingga Pasal 59 Ayat (3) akan berbunyi, ” Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.” Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa calon perseorangan yang dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Syarat jumlah dukungan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh

lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UUPD 2008), persyaratan dan mekanisme pencalonan Kepala Daerah sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Pencalonan melalui partai politik sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan.
- 2) Jika diajukan oleh gabungan partai politik, suara partai politik tersebut juga harus memenuhi 15%. Partai politik yang tidak

⁶⁹Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59

memenuhi 15 % dapat melakukan koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan pasangan Kepala daerah.

- 3) Untuk Calon Perorangan diatur dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

Pasangan calon perorangan untuk Gubernur dan wakil Gubernur dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 % (enam koma lima persen).
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diatas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten / kota di provinsi dimaksud.⁷⁰

⁷⁰Sri Soemantri, *Otonomi daerah*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 261

Sedangkan, untuk pasangan calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati Wakil bupati, atau walikota atau Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6.5% (enam koma lima persen)
- b. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen), dan
- c. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);dan
- d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diatas tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dikabupaten/ kota dimaksud.

Ketentuan di atas menunjukan bahwa calon perseorangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat pernyataan dukungan yang terlampir dalam

kartu identitas. Jika telah memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pasangan bakal calon kepala daerah dan wakilnya. Jika telah dinyatakan lolos verifikasi, maka KPUD menetapkan pasangan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan calon. Proses selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.⁷¹

Untuk calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhadap calon perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan partai politik yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala Daerah. Syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat dari pada syarat partai politik yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁷²

⁷¹Sri Warjiati, "Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala daerah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 1, (April 2014), h. 118-121

⁷²Desriadi, "Analisis Implementasi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Trias Politika*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2017), h. 127.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung

Pemilihan umum merupakan momentum bagi setiap negara dalam pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya *representative democracy* adalah melalui dan untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk KPU. Pada awal terbentuknya (1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari partai politik dan elemen

Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dimana perubahan penting, yaitu bahwa Pemilu tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah KPU yang independen dan nonpartisipan. Independen dan nonpartisipan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisipan.⁷³

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada Pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari oleh kepentingan, sehingga sering terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah mengembirakan karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan intervensi partai politik maupun pemerintah.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilihan umum dan atas usul inisiatif DPR maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

⁷³Profil KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2014, h. 1

Dengan demikian Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri.

KPU Kota Bandar Lampung dibentuk pada Tahun 2003. Pada awal pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang kasubbag, yaitu:

1. Kasubbag Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kasubbag Hukum

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jenderal KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.

1. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung

Visi:

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilu yang Memiliki Integritas, Professional, Mandiri, Transparan Dan Akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bermartabat.

Misi:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷⁴
- 3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil untuk menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita dan masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Tujuan dan Sasaran:

a. Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

⁷⁴*Ibid.*, h. 3

4) Melaksanakan Pemilu secara luber dan jurdil.

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu calon anggota legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan Teknologi Informasi;
- 5) Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

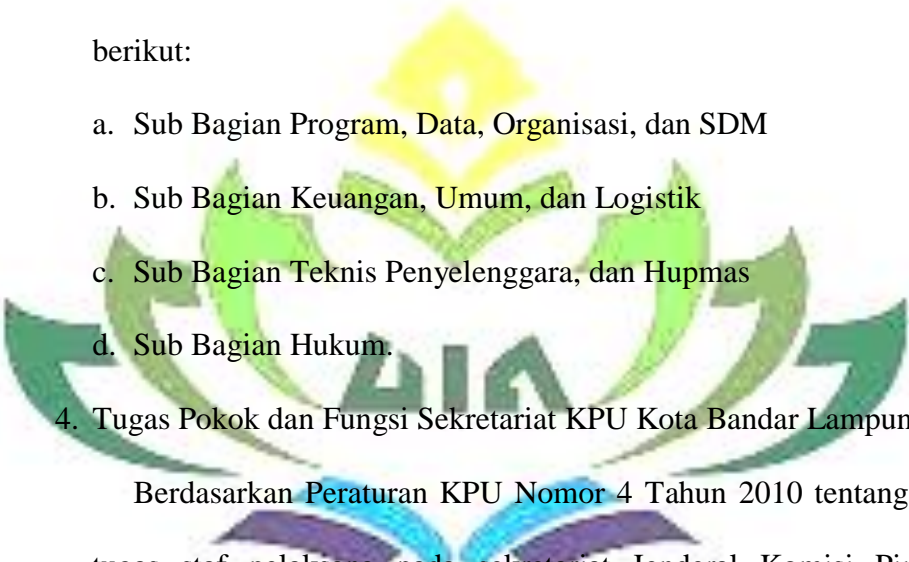
3. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dar 2 (dua) unsur yaitu:

- a) Komisioner KPU yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan empat orang anggota.
- b) Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Unsur Sekretariat membantu Komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan Administrasi Umum dan Keuangan, Personalia dan Rumah Tangga.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- 
- a. Sub Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
 - c. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas
 - d. Sub Bagian Hukum.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Ketiga Pasal 61; tugas pokok dan fungsi dari staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;

- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- 5) Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- 7) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban:

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu

3) Mengelola barang inventaris KPU

B. Payung Hukum KPU Kota Bandar Lampung

Dasar hukum yang mendasari terbentuknya KPU Kota Bandar Lampung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara KPU. Sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Bandar Lampung, sama halnya dengan KPU RI, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung juga dilaksanakan oleh KPU yang bersifat Nasional Tetap dan Mandiri yang tugas dan fungsinya diatur berdasarkan konstitusi diantaranya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merupakan lembaga Pemilu yang permanen dan dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh PPK dan PPS, KPPS yang bersifat *ad-hoc*. Panitia tersebut mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan Umum di Kota Bandar Lampung khususnya menuju terwujudnya Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

C. Sistem Rekrutmen Calon Perseorangan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 pada KPU Kota Bandar Lampung

Pemilihan calon perseorangan kepala daerah di KPU Kota Bandar Lampung dilakukan pertama kali pada tahun 2010 yaitu pemilihan walikota Bandar Lampung yang dimenangkan oleh Murdiono, prosesnya mereka mengumpulkan syarat dukungan ktp sebanyak 6,5 % dari jumlah


DPT (daftar pemilih tetap). Sistem rekrutmen dilakukan dengan sosialisasi syarat dukungan perseorangan, sosialisasi ini dilakukan dimasing-masing KPU daerah masing-masing. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di KPU masing-masing. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Setelah calon perseorangan melakukan pendaftaran, akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam verifikasi faktual berkas dukungan kandidat pasangan calon independen, KPU menggelar Simulasi Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan. Hal ini dilakukan karena simulasi penting dilakukan karena verifikasi faktual berkas dukungan kandidat pasangan calon independen harus melalui mekanisme yang ketat, efektif, dan efisien. Selain itu, diperlakukan juga pemahaman yang sama antara pihak kandidat pasangan calon independen dan KPU sendiri.

Untuk calon independen atau perseorangan sebagai syarat dukungan yaitu memiliki 636.366 orang jumlah DPT dengan dibuktikan menggunakan soft dan hard copy E-KTP atau surat keterangan dari

disdukcapil. Sedangkan persentase dukungan syarat bakal pasangan calon independen adalah sebesar 6,5% dari jumlah penduduk, yang didapatkan hasil jumlah minimal syarat dukungan adalah sebesar 41.364 orang.⁷⁵

D. Mekanisme KPU Kota Dalam Menjaring Calon Perseorangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung yaitu:

- 
- a. Sosialisasi kepada masyarakat
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan teknis ke KPU masing-masing daerah
 - c. Membentuk Badan Penyelenggara Pemilu
 - d. Pemutakhiran data Pemilihan Kepala Daerah
 - e. Proses pendaftaran pasangan calon. Calon perseorangan telah melakukan tahap sebelumnya dengan memverifikasi dukungan ke KPU
 - f. Penetapan pasangan calon
 - g. Kampanye
 - h. Debat
 - i. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H selaku ketua KPU Kota Bandar Lampung

- j. Masa tenang dan pembersihan alat untuk media kampanye (alat peraga)
- k. Pemungutan suara
- l. Rekapitulasi tingkat kecamatan
- m. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
- n. Rekapitulasi tingkat provinsi

Setelah mengalami beberapa perubahan sehingga di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mekanisme KPU Kota Bandar Lampung dalam menjaring calon perseorangan ditentukan berdasarkan pada dokumen dukungan dengan dilampiri jumlah penduduk dalam DPT, syarat dukungan menyerahkan foto copy ktp, rekapitulasi jumlah dukungan dengan tanda tangan dari jumlah DPT. Kemudian minta penyelenggara Pemilu dikelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat di teliti, jika masyarakat memberikan pernyataan benar maka dibuat memenuhi syarat, yang menyatakan tidak benar diminta untuk tanda tangan maka dibuat tidak memenuhi syarat, jika tetap tidak memberikan pernyataan tidak benar dan tidak mau tanda tangan dibuat tetap memenuhi syarat, kemudian diserahkan ke KPU Kota Bandar Lampung, kemudian KPU Kota Bandar Lampung merekapitulasi cukup atau tidak jumlah 6,5% jika cukup diperbolehkan mendaftar. ⁷⁶

Sesuai peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Musnawi. S.E sebagai Kasubbag Hukum KPU Kota Bandar Lampung

atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 8 Ayat 2 pada point (b) menyebutkan bahwa KPU Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan calon perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir. Setiap bakal calon perseorangan yang sudah mengumpulkan foto copy KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil sesuai dengan batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, harus lolos seleksi dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kota yang menggelar Pemilihan. Meliputi penelitian administrasi dan penelitian faktual. Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 16, penelitian atau verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU terhadap dokumen dukungan pasangan calon dengan cara:

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam soft copy formulir Model B.1 –KWK Perseorangan.
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam soft copy dengan hard copy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK.

Ada beberapa faktor penghambat bagi calon perseorangan adalah sulit mengumpulkan dukungan. Masyarakat Kota Bandar Lampung kurang lebih sebanyak 636.336 jiwa, jika syaratnya harus 6,5% setidaknya calon perseorangan tersebut harus mengumpulkan 41.364

dukungan atau KTP dari masyarakat, kemudian tidak mengenal dengan baik sistem pencalonan, mereka juga harus mengolah KTP tersebut dalam soft copy kemudian di publikasikan pada sistem informasi pencalonan.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada KPU Kota Bandar Lampung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 mengabulkan *judicial review* atas permohonan pemohonan anggota DPRD Lombok Lalu Ranggalawe, dalam putusan MK tersebut syarat yang di berikan minimal 6,5% dari jumlah DPT. Calon perseorangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat pernyataan dukungan yang terlampir dalam kartu identitas. Jika telah memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah dilampirkan oleh pasangan bakal calon kepala

daerah dan wakilnya. Jika telah dinyatakan lolos verifikasi, maka KPUD menetapkan pasangan calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan calon. Proses selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

KPU Kota Bandar Lampung dibentuk pada Tahun 2003. Pada awal pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang kasubbag, yaitu:

- a. Kasubbag Umum dan Logistik
- b. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
- c. Kasubbag Hukum

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jenderal KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.

Sistem rekrutmen dilakukan dengan sosialisasi syarat dukungan perseorangan, sosialisasi ini dilakukan dimasing-masing KPU daerah masing-masing. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di KPU masing-masing. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian penyerahan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Setelah calon perseorangan melakukan pendaftaran, akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen. Untuk calon independen atau perseorangan sebagai syarat dukungan yaitu memiliki 636.366 orang jumlah DPT dengan dibuktikan menggunakan soft dan hard copy E-KTP atau surat keterangan dari disdukcapil. Sedangkan persentase dukungan syarat bakal pasangan calon independen adalah sebesar 6,5% dari jumlah DPT, yang didapatkan hasil jumlah minimal syarat dukungan adalah sebesar 41.364 orang.

Mekanisme KPU Kota Bandar Lampung dalam menjaring calon perseorangan ditentukan berdasarkan dalam jumlah penduduk dalam DPT, syarat dukungan menyerahkan foto copy ktp dengan tanda tangan dari jumlah DPT, kemudian minta penyelenggara Pemilu dikelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat di teliti, jika masyarakat memberikan pernyataan benar maka dibuat memenuhi syarat, yang menyatakan tidak benar diminta untuk tanda tangan maka dibuat tidak memenuhi syarat, jika tetap tidak memberikan pernyataan tidak benar dan tidak mau tanda tangan dibuat tetap memenuhi syarat, kemudian diserahkan ke KPU Kota Bandar Lampung, kemudian KPU Kota Bandar Lampung merekapitulasi cukup atau tidak jumlah 6,5% jika cukup diperbolehkan mendaftar.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu: Sosialisasi kepada masyarakat, Sosialisasi dan penyuluhan teknis ke KPU masing-masing daerah, Membentuk Badan Penyelenggara Pemilu, Pemutakhiran data Pemilihan Kepala Daerah, Proses pendaftaran pasangan calon. Calon perseorangan telah melakukan tahap sebelumnya dengan memverifikasi dukungan ke KPU, Penetapan pasangan calon, Kampanye, Debat, Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik, Masa tenang dan pembersihan alat untuk media kampanye (alat peraga), Pemungutan suara, Rekapitulasi tingkat kecamatan, Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dan Rekapitulasi tingkat provinsi.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemimpin diwajibkan bersikap adil dan jujur dengan kepemimpinannya, sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 8. Dijelaskan bahwa pemimpin itu harus adil dalam bidang ekonomi, social, dan hukum. Seorang pemimpin tidak boleh pandang bulu terhadap rakyatnya dalam menegakan supremasi hukum.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا

قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا
صَنَعَتْ يَمِينُهُ

Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu hurairah r.a: berkata: bersabda Nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah: Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. (H.R Bukhari dan muslim)

Secara teori, konsep mekanisme calon perseorangan dalam Islam meliputi, *pertama, Mashlahah Ammah* yaitu kepentingan umum yang menyangkut orang banyak. Kemashlahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Kemashlahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyyah, sehingga kebijakan apapun maupun perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan. *Kedua, Hurriyah Ar-Ra'y* yaitu kebebasan berpendapat

yang juga berarti kebebasan berbicara. istilah *hurriyyah al-ra'y* dan bukan *hurriyyah al-qawl* menunjukkan bahwa para ulama dan sarjana muslim telah menempatkan kedudukan yang amat penting dalam tradisi pemikiran dan keilmuan Islam. Istilah *ra'y* dalam tradisi pemikiran dan keilmuan Islam biasanya terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu yang terpuji, tercela, dan di ragukan. Setiap orang boleh mengemukakan pendapat sejauh tidak melanggar hukum yang mengandung penghujatan dan fitnah, serta didasarkan pada argumen yang logis, faktual bertanggung jawab.

Ketiga, Hurriyah Al-Syakshiyah yaitu kebebasan berperilaku secara khusus dan Hak-Hak Asasi Manusia yang secara umum yang telah diatur dalam Islam juga. Siapapun diberikan hak sebesar-besarnya untuk berperilaku secara bebas namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orangnya wajib tunduk atas batasan-batasan yang telah diberikan oleh agama maupun negara yang terejawantah di dalam undang-undang dan nilai-nilai keislaman dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama dan kebangsaan dan ketertiban atau kemashlahatan umat.

Dalam kaidah fiqh yang sesuai dengan konsep mashlahah adalah *La Dharara Wala Dhirara*. Dharurat ialah kemashlahatan yang menyangkut

kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, ada lima macam mashlahat yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri).

Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab Suci, kepada Malaikat, kepada hari akhir, melakukan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah dalam kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, manusia juga berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengertian *La Dharara Wala Dhiraraitu* sendiri adalah tidak boleh memudharatkan dan membalas kemudharatan. Pengertian dharar yaitu bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu (orang lain) ada mudharat, sedangkan dhirar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudharatkan.

Dari hasil penelitian pada KPU Kota Bandar Lampung jika dikaitkan dengan teori *Mashlahah Ammah* (kepentingan umum) ada sekelompok *civil society* yang merasa bahwa partai politik belum mengakomodir calon-calon yang dikehendaki oleh mereka karena di Undang-Undang No 10 tahun 2016 revisi ketiga, revisi yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal 20% kursi parlemen. Jumlah kursi di DPRD Kota jumlah kursi 50 berarti 20% dari 50 adalah 10 kursi, sehingga

sekelompok civil society tersebut ingin ada alternatif yang pengusungan calon pasangan tersebut dilakukan dengan kehendak bersama masyarakat yang maksudnya bukan lagi dari partai politik tapi dari masyarakat.

Teori yang kedua yaitu *Hurruriyah Ar-Ra'y* (bebas berpendapat) ini termasuk hak dasar, kaitannya dengan teori tersebut adalah masyarakat tidak hanya bebas berpendapat tapi bebas menentukan pilihannya. Bisa jadi masyarakat sebelum pemilihan memilih calon perseorangan tetapi saat pemilihan memilih calon dari partai politik. Setiap orang boleh mengemukakan pendapat sejauh tidak melanggar hukum yang mengandung penghujahan dan fitnah, hal ini sesuai dengan corak demokrasi Indonesia sehingga dalam pemilihan kepala daerah siapapun berhak menyatakan dirinya untuk maju sebagai calon kepala daerah dengan atau tanpa partai politik.

Teori yang ketiga yaitu *Hurruriyah Al-Syaksyiyah* (kebebasan berperilaku, kaitannya dengan teori tersebut adalah masyarakat bebas berperilaku dan kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. Siapapun diberikan hak sebesar-besarnya untuk berperilaku secara bebas namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orangnya wajib tunduk atas batasan-batasan yang telah diberikan oleh agama dan Negara yang sesuai undang-undang dan nilai keislaman.

Teori ini sesuai dengan kebebasan yaitu surat Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

a. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007

Tentang Kebolehan Calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada KPU Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan baik. Secara teori dapat disimpulkan yaitu Calon perseorangan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengumpulkan dukungan dari konstituennya. Dukungan ini dapat dilakukan dengan surat pernyataan dukungan yang terlampir dalam kartu identitas. Jika telah memenuhi persyaratan maka syarat yang telah dikumpul diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk diverifikasi, dengan syarat 6,5% dari jumlah DPT. Sedangkan pada KPU Kota Bandar Lampung mekanisme dan sistem

rekrutmen calon perseorangan yaitu system rekrutmen dilakukan dengan sosialisasi yang di lakukan pada KPUD masing-masing, kemudian untuk mekanisme nya di lakukan dengan mengumpulkan fotocopy kartu identitas dari jumlah DPT.

- b. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah sudah sesuai dengan konsep *Mashlahah Ammah*, *Hurriyyah Ar-Ra'y*, dan *Hurriyyah As-Syakhsiyyah*. Dalam konsep Fiqh Siyasah mekanisme pemilihan pemimpin yaitu dengan baiat dan syura. Baiat adalah proses pengangkatan atau pelantikan pemimpin, sedangkan Syuro adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organisasi untuk memutuskan sesuatu hal. Konsep mekanisme calon perseorangan yaitu mengedepankan prinsip *Mashlahah Ammah* (kepentingan umum), *Hurriyyah Ar-Ra'y* (kebebasan berpendapat), dan *Hurriyyah As-Syakhsiyyah* (kebebasan berperilaku).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah karena persyaratan dan mekanisme nya memberatkan dan menghambat calon perseorangan.

2. Untuk partai politik adanya calon perseorangan jangan dijadikan sebagai sumber kontroversi yang bermotif kepentingan yang mana adanya calon Perseorangan yang dianggap melemahkan dan membahayakan eksistensi partai politik hal itu tidak perlu apabila memang demokrasi hendak di terapkan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu partai politik hendaknya berbenah diri untuk memperbaiki sistem serta kaderisasi yang baik agar memunculkan calon pemimpin yang berkualitas yang mementingkan rakyat serta hindari *money politic* dalam saat pencalonan.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, 2011
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- A Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- A Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jilid III)*, Jakarta: al husna Zikir, 2000.
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

I Ketut Putra Erawan, *Logika Perubahan dan Keterlanjutan Sistem Pemilihan Umum bagi Indonesia*, Jakarta: 2009.

Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khairuddin dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Media Pratama, 2007.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2002.

Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Siti Mahmudah, *Sejarah Peradaban Islam*, Lampung: fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan

Sri soemantri, *Otonomi Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2014.

Syarifuddin Jurdin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia (Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (2)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pemilihan dalam mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 huruf b

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 1 Ayat 27

Internet/ Jurnal

Desriadi, “Analisis Implementasi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, *Jurnal Trias Politika*, , Vol. 1, No. 2, (Oktober 2017)

Jogal's Note, “*Pengertian dan Macam-Macam Putusan* “ (On-Line), Tersedia di www.Jojogablash.Wordpress.Com, 8 Februari 2018

<http://seputar> pengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada., 9 februari 2018

Muhakki, “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyyah)”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 1, No.2, (Oktober 2011)

Muhammad Rusfi,” Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al- ‘Adalah*, Vol.XII, No. 1,(Juni 2014)

Sri Warjiati, “ Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No 1, (April 2014).

Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta:Presentasi Pustaka, 2005).

Wikipedia, “ *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” (On-Line), tersedia di <https://idm.wikipedia>. Orang, 8 Februari 2018.

Yubsir, “ Maqashid Al-Syari’ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Al- ‘Adalah* , Vol. XI, No. 2,(Juli 2013)